

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebuah perusahaan yang menjalankan sebuah bisnis tentunya memiliki sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh para manajernya. Pengusaha ingin mendapatkan hasil maksimal dari bisnis mereka. Karena setiap pemilik perusahaan menginginkan modal yang diinvestasikan di perusahaannya mengalir kembali dengan cepat (Bulan, 2017). Perusahaan perlu melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan nilai bisnisnya agar dapat menarik minat masyarakat luas, terutama investor yang ingin berinvestasi di bisnis tersebut. Karena merepresentasikan kinerja dan kondisi perusahaan yang dapat mempengaruhi pandangan investor terhadap perusahaan, maka nilai perusahaan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan. Karena ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bagi investor, nilai perusahaan sangat penting. Jika dikatakan dengan benar, bisnis yang ingin memaksimalkan keuntungan biasanya akan memusatkan upayanya untuk meningkatkan nilai perusahaan hingga mencapai pendapatan yang maksimal, yang menjadi tolak ukur keberhasilan bisnis. Semakin bernilai sebuah bisnis, semakin sejahtera pemiliknya (Situmeang & Wiagustini, 2018). Tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menjalankan bisnisnya, perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Indrarini (2019), di dalam buku karangannya yang berjudul nilai perusahaan melalui kualitas laba yang menyatakan bahwa menurut persepsi investor, keberhasilan sebuah perusahaan adalah seberapa suksesnya dalam mengelola sumber daya perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan menarik investor untuk menginvestasikan modalnya. Perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini menghadapkan perusahaan pada situasi persaingan di berbagai sektor. Perusahaan cenderung menempatkan diri pada kondisi yang aman dan stabil agar dapat bersaing dalam jangka panjang. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan merupakan dasar untuk menilai apakah perusahaan dalam kondisi baik atau buruk. Investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut jika nilai perusahaan baik. Salah satu indikator nilai perusahaan tercermin dari harga sahamnya. Harga saham menjadi dasar pandangan investor untuk menilai tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Investor cenderung akan berinvestasi jika harga saham suatu perusahaan tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa et al. (2018), yang menjelaskan bahwa ketika banyak investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan, maka nilai perusahaan akan meningkat. Kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi cara perusahaan dalam menjalankan operasi bisnisnya (J. Xu et al., 2021). Untuk dapat bertahan, setiap perusahaan harus bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut (Rinofah et al., 2022). Menurut Andriani & Trisnaningsih (2023), dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang perlu menciptakan strategi bisnis yang baru. Pada

dasarnya, perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan pemilik dan pemangku kepentingan (Ahmad et al., 2018). Perusahaan yang berfokus pada profit dan memiliki basis pelanggan yang besar akan terus berusaha untuk meningkatkan nilainya kepada masyarakat sekaligus mengembangkannya secara berkelanjutan (Kusumandari & Sapari, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan fokus pada *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di kalangan perusahaan dan investor, menurut sebuah artikel berita, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menyatakan bahwa upaya adaptasi dan peningkatan kinerja ESG untuk mendukung pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pemulihan ekonomi akan ditingkatkan. Namun, mengingat perusahaan-perusahaan di Indonesia masih dalam tahap awal dalam mengintegrasikan konsep keberlanjutan, banyak perusahaan yang belum mengoptimalkan praktik ESG mereka untuk memberikan informasi kepada publik terkait keberlanjutan bisnis mereka (Leony et al., 2024). Sebelum penerapan kebijakan ESG, banyak perusahaan menempatkan prioritas yang lebih tinggi untuk mencapai profitabilitas dan pertumbuhan keuangan, dan sering kali mengabaikan dampak lingkungan dan sosial dari operasi mereka. Perusahaan-perusahaan ini lebih cenderung mengklaim kredit sepihak untuk inisiatif mereka. Sebaliknya, perusahaan yang mengadopsi strategi ESG memprioritaskan mitigasi dampak lingkungan yang merugikan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pembentukan praktik tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab (Kusumawardhani et al., 2023).

Berdasarkan hasil dari data dalam Gambar 1.1 berikut menunjukkan bahwa perkembangan suatu indeks *IDX ESG Leaders* mengalami kenaikan dan penurunan yang dimana pada bulan Maret 2024 dan April 2024 sedikit mengalami kenaikan nilai saham namun saat menuju bulan Mei 2024 dan Juni 2024 indeks tersebut telah mengalami penurunan yang cukup signifikan akan tetapi ketika memasuki bulan Juli 2024 hingga November 2024 mengalami kenaikan drastis dan turun kembali pada awal tahun tepatnya pada bulan Januari 2025 yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.



**Gambar 1.1 Grafik Kinerja Indeks *ESG Leaders***

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (2025), diakses pada 28 Januari 2025

*Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah menjadi pertimbangan krusial bagi investor dalam menghadapi perubahan iklim dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), seringkali diukur melalui *ESG risk rating* maupun *ESG score*. Beberapa riset mengenai isu ESG terhadap nilai perusahaan telah dilakukan. Menurut Rahelliamelinda & Handoko (2024), dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja ESG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Dogi et al. (2024), menyatakan bahwa kinerja ESG memiliki dampak negatif dengan nilai perusahaan. Adapula

beberapa perusahaan yang tercatat pada susunan peringkat bintang ESG di Indonesia yang sudah menerapkan prinsip ESG di dalamnya termasuk PT AKR Corporindo Tbk, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan-perusahaan tersebut dikenal karena komitmen mereka terhadap praktik ESG yang baik dan inklusif yang jelas berbeda dengan perusahaan yang tidak atau belum menerapkan ESG. Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2010 yakni kasus meledaknya kilang minyak *Deepwater Horizon* yang berada di wilayah Teluk Meksiko akibat kegiatan operasional dari *British Petroleum*. Maka dengan demikian, menyebabkan dampak biaya yang sangat besar bagi bisnis *British Petroleum* sebesar US\$ 65 miliar dalam bentuk pengenaan denda dan tanggung jawab yang disanksikan kepada mereka untuk melakukan pembersihan akibat kejadian tersebut. Selain itu, penerapan ESG di Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan terkait kegiatan operasional perusahaan yang berakibat pada implementasi ESG. Salah satunya adalah kasus serupa terkait pilar lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan di laut Karawang oleh PT Pertamina Hulu Energi pada tahun 2019 akibat bocornya sumur YYA-1 yang mengakibatkan sejumlah ekosistem laut terdampak (Danial et al., 2023). Selanjutnya, ada kasus pilar sosial di PT GoTo (Gojek & Tokopedia) Tbk pada tahun 2020 terkait kebocoran data dari konsumen dan mengakui adanya pencurian data serta aktivitas jual beli data pribadi milik pengguna aplikasi (Akbar & Persada, 2021). Kemudian, terdapat kasus pada pilar tata kelola yaitu PT Sumalindo Lestari

Jaya Tbk pada tahun 2019 melakukan sejumlah kecurangan dan pelanggaran serta menyalahgunakan wewenang saat mengelola aset perusahaan terhadap hak-hak pemegang saham (Amin, 2024).

Perusahaan tersebut terlibat ke dalam kegiatan operasional yang merusak lingkungan dan tidak memperdulikan kesejahteraan sosial. Akibatnya, perusahaan tersebut harus menanggung biaya yang besar guna memperbaiki kerusakan lingkungan dan menghadapi berbagai tuntutan hukum yang berlaku dari masyarakat yang sudah dirugikan atas kegiatan tersebut. Hal ini tidak hanya merugikan perusahaan dari segi keuangan, akan tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan dari para pemegang saham perusahaan serta masyarakat luas. Perusahaan harus menghadapi beberapa tantangan jangka menengah dan panjang selama dua dekade terakhir, termasuk masalah lingkungan, Adomako & Tran (2022), seperti meningkatnya polusi udara, pemanasan global, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis secara umum dengan mempengaruhi lingkungan ekonomi secara negatif membawa tantangan tambahan bagi organisasi, yang dianggap bertanggung jawab atas beberapa dampak negatif terhadap lingkungan (Lozano, 2015). Perusahaan semakin menyadari pentingnya transparansi dalam mengungkapkan kinerja ESG mereka.

Di Indonesia, laporan keberlanjutan menjadi sarana komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan terkait upaya pengelolaan ESG yang dilakukan perusahaan. Menurut Irwansyah Harahap (tahun 2023 dalam [dqsglobal.com](https://dqsglobal.com)), dalam sebuah artikelnya yang menyatakan bahwa kinerja ESG kini menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor. Isu-isu

lingkungan dan sosial yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong perusahaan untuk meresponsnya. Agar dapat meningkatkan kredibilitas dan mempertahankan keberlanjutan, perusahaan perlu mendapatkan verifikasi eksternal melalui laporan keberlanjutan. Perusahaan yang mampu mengelola ketiga aspek ESG dengan baik cenderung memiliki kinerja jangka panjang yang lebih solid dan dapat memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingannya.

Pada tahun 2022, Direktur BEI mengumumkan jumlah perusahaan yang merilis laporan keberlanjutan dan meraih peringkat emas terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga akhir Desember 2021, tercatat sebanyak 154 perusahaan telah menyusun laporan keberlanjutan, meningkat signifikan dibandingkan 54 perusahaan pada tahun 2019. Berdasarkan penilaian kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan bahwa perusahaan dengan peringkat emas naik dari 47 pada tahun 2021 menjadi 51 pada tahun 2022 (Proper, 2022). Kenaikan ini mencerminkan tuntutan terhadap perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dan berinovasi dengan memperhatikan aspek lingkungan. Langkah ini terbukti menarik perhatian investor pada instrumen keuangan berbasis ESG, yang meningkat 20% sejak pandemi Covid-19 menurut survei BNP Paribas Global (I. N. Sari, 2021). Tren tersebut memberikan dorongan bagi perusahaan untuk menyadari pentingnya hubungan erat antara kesuksesan bisnis dan dukungan pemangku kepentingan, sekaligus menekankan perlunya mengelola dampak operasional terhadap lingkungan sekitar.

Hal ini relevan dengan laporan menurut Haryanti Puspa Sari & Aprillia Ika (tahun 2024 dalam [kompas.com](https://www.kompas.com)), yang melaporkan bahwa Ketua Umum *Indonesian Corporate Secretary Association* (ICSA) Katharine Grace mengatakan, penerapan ESG atau tata kelola lingkungan, sosial, dan perusahaan dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan di mata para investor. Perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia saat ini mulai banyak menerapkan ESG guna meningkatkan perhatian para investor asing. Sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di bursa, investasi oleh investor itu sangat memerhatikan apakah perusahaan itu sudah menerapkan ESG dengan baik. Katharine mengatakan, paradigma bahwa *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi beban perusahaan sudah terbantahkan. Penerapan ESG saat ini, dapat meningkatkan profit perusahaan. Paradigma ESG sebagai sebuah beban awalnya kita harus melihat bahwa dengan memberlakukan ESG yang baik di dalam kebijakan sebuah perusahaan itu akan meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan. Senada dengan Katharine, *Co-Founder & CEO Olahkarsa*, Unggul Ananta mengatakan, penerapan ESG telah menjadi fokus dunia bisnis dari berbagai sektor. Banyak perusahaan di seluruh dunia telah mengakui bahwa *Environmental, Social, and Governance* (ESG) bisa menjadi “*long term value creation*” bagi bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, kami memandang bahwa konsep ESG perlu terus digalakkan, dipahami dan diimplementasikan dalam tata kelola bisnis di berbagai sektor, sebagai langkah mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sebelumnya, *Expert Council Komite Nasional Kebijakan Governansi* (KNKG) Mas Achmad Daniri mengatakan perusahaan yang telah mengedepankan prinsip ESG terbukti lebih tahan banting

dan mampu memberikan hasil investasi yang berkelanjutan. Menurut Daniri yang juga salah satu dewan juri ajang *Tren Asia ESG Award 2023* pada Agustus 2023, saat ini aspek ESG telah menjadi topik yang sangat penting pada berbagai kalangan, baik pelaku usaha, pemerintah, maupun investor. Daniri menjelaskan, kesadaran akan pentingnya penerapan ESG bukan hanya di tingkat global, bahkan saat ini kesadaran masyarakat Indonesia akan ESG ini juga semakin tajam. Kami meyakini dengan praktik ESG, perusahaan bukan hanya bisa mengejar laba dan imbal hasil besar, tapi fokus bagaimana keuntungan tersebut memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pada Januari 2025, Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan pelaporan ESG yang terintegrasi ke dalam sistem Sarana Keterbukaan Informasi bagi Perusahaan Tercatat (*SPE-IDXnet*) melalui Formulir E020 terkait laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Pengembangan ini bertujuan untuk mendorong penerapan isu keberlanjutan dan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di pasar modal Indonesia serta mendukung peningkatan tata kelola dan transparansi data *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pada perusahaan yang tercatat di BEI. Kegiatan ini diselenggarakan di *Main Hall* BEI dan dibuka oleh Direktur Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Evy Junita, bersama Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, dan Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna. Fitur ini juga telah diselaraskan dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, dan Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Pengenalan pelaporan ESG diharapkan dapat mendukung kemajuan pasar modal Indonesia dalam mengedepankan aspek keberlanjutan, mendorong integrasi yang lebih baik dari *ASEAN Exchanges Common ESG Metrics* ke dalam ekosistem pasar modal ASEAN untuk meningkatkan visibilitas ASEAN sebagai sebuah kelas aset secara kolektif, dan memperkuat ASEAN sebagai tujuan investasi yang menarik.

Kegiatan bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi yang besar, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Dunia bisnis kini diharapkan untuk menerapkan prinsip bisnis berkelanjutan yang menitikberatkan pada *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Alasannya adalah bahwa pembangunan berkelanjutan yang mencakup semua aspek merupakan salah satu cara untuk mengurangi berbagai dampak buruk dari kerusakan lingkungan sekaligus mempromosikan kesejahteraan. Perusahaan yang mengungkapkan aspek ESG menyiratkan tujuan untuk peningkatan ekonomi. Pengungkapan lingkungan adalah bentuk transparansi perusahaan dalam menjaga dan melindungi lingkungan serta dampak alami yang ditimbulkannya (Widyawati & Hardiningsih, 2022). Di Indonesia, penerapan ESG oleh beberapa perusahaan terus berkembang, seperti yang terlihat dari peningkatan investasi berkelanjutan yang semakin menekankan pentingnya aspek ESG yang baik. Perusahaan yang secara efektif menerapkan ESG memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu strategis jangka panjang, yang memungkinkan mereka mengelola tujuan mereka dengan lebih efektif. Namun, meskipun banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menerapkan ESG, beberapa di antaranya terus melakukan eksploitasi sumber daya alam secara

besar-besaran untuk keuntungan finansial yang signifikan, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan yang substansial (Syafriullah & Muharam, 2017). Perubahan nilai perusahaan, baik peningkatan maupun penurunan, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut pendapat dari Pasaribu et al. (2019), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat dua kategori faktor keuangan yang memengaruhi nilai perusahaan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi struktur modal, pertumbuhan aset, dan profitabilitas, sedangkan faktor eksternal mencakup inflasi dan nilai tukar mata uang. Selain faktor keuangan, penelitian juga menunjukkan bahwa faktor non-keuangan turut berperan dalam memengaruhi nilai perusahaan, di antaranya adalah *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta transaksi pihak berelasi.

Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah dengan melakukan transaksi pihak berelasi (Suninono et al., 2023). Transaksi pihak berelasi diatur berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 Revisi 2009 mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi. Informasi terkait transaksi pihak berelasi atau *Related Party Transaction* (RPT) sangat penting bagi investor maupun pengguna lainnya, karena dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik kepentingan yang mungkin mempengaruhi nilai saham perusahaan (Maigoshi et al., 2016). Aktivitas transaksi pihak berelasi juga berisiko menimbulkan konflik keagenan dan asimetri informasi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pengguna laporan keuangan memiliki persepsi negatif terhadap nilai perusahaan. Transaksi pihak berelasi dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dalam hal pendanaan dan mengurangi biaya transaksi karena

dilakukan dengan pihak internal, bukan pihak ketiga. Namun, transaksi pihak berelasi juga dapat mengurangi pengawasan eksternal.

Di wilayah Asia, fenomena ini sering kali sebaliknya, terutama pada perusahaan yang dimiliki oleh kelompok keluarga, yang sering menghadapi masalah terkait transaksi semacam itu. Kasus terbaru yang melibatkan transaksi pihak berelasi terkait piutang dan hutang terjadi di PT AirAsia Indonesia Tbk. Pada bulan Desember 2021, perusahaan menghadapi tantangan arus kas operasional akibat pembatasan sosial yang diberlakukan selama pandemi COVID-19. Kondisi ini berdampak pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk pembayaran kepada pihak-pihak berelasi. Untuk mengatasi hal tersebut, AirAsia Indonesia mendapatkan dukungan dana dari Grup AirAsia untuk mendukung biaya operasional, termasuk pembayaran gaji karyawan. Transaksi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai transaksi afiliasi dan transaksi material. Selain itu, laporan keuangan PT AirAsia Indonesia Tbk per kuartal ketiga tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan piutang lain-lain dari pihak berelasi yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 58 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari transaksi dengan *Thai AirAsia Co, Ltd* di mana piutang tersebut terkait dengan penerimaan kas oleh perusahaan. Manajemen perusahaan menyatakan bahwa 99,8% dari piutang tersebut adalah lancar, sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai piutang. Hal ini menunjukkan hubungan keuangan yang erat antara entitas-entitas di dalam grup AirAsia, terutama dalam hal manajemen arus kas dan likuiditas. Fenomena transaksi pihak berelasi seperti yang terjadi pada AirAsia Indonesia juga

menjadi fokus penelitian akademis. Penelitian yang dilakukan oleh Adhie (2022), menunjukkan bahwa peningkatan transaksi piutang dengan pihak berelasi berhubungan positif dengan peningkatan kompensasi dewan. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen dapat memanfaatkan transaksi tersebut untuk meningkatkan remunerasi mereka. Namun, tidak semua transaksi pihak berelasi memiliki dampak positif terhadap manajemen. Studi yang sama menemukan bahwa transaksi yang berkaitan dengan aset selain piutang usaha dan kewajiban yang berkaitan dengan utang usaha dengan pihak berelasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kompensasi dewan komisaris. Hal ini berarti bahwa semakin banyak perusahaan melakukan transaksi semacam ini, semakin rendah kompensasi yang diterima oleh dewan komisaris. Temuan ini menyoroti kompleksitas dan potensi konflik kepentingan dalam mengelola transaksi pihak berelasi.

Transaksi pihak berelasi pada umumnya diketahui sebagai jenis transaksi bisnis yang biasa dilakukan antar perusahaan. Dalam hal ini, transaksi pihak berelasi bertujuan untuk menciptakan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan pihak berelasi perusahaan melalui efisiensi transaksi yang dapat memaksimalkan potensi laba perusahaan. Bagi perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi, kebijakan yang diterapkan terkait alokasi sumber daya di dalam perusahaan lebih rentan hanya memberikan keuntungan bagi grup perusahaan tetapi merugikan investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut. Selain itu, permasalahan lain yang terjadi pada transaksi pihak berelasi adalah terkait kewajaran transaksi yang masih diragukan. Pasar menilai transaksi pihak berelasi yang dilakukan kurang

dipercaya karena adanya kecurangan dalam pelaporan. Senada dengan pernyataan tersebut, menurut pendapat Chen et al. (2009), dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa transaksi pihak berelasi berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Dengan memperhatikan transaksi penjualan pihak berelasi dilakukan oleh perusahaan pada dasarnya untuk meningkatkan intensitas penjualan dan menekan biaya transaksi. Intensitas penjualan yang tinggi dan penghematan biaya akan berdampak baik pada peningkatan pendapatan sehingga nilai perusahaan akan lebih tinggi. Sebaliknya akan berbeda jika perusahaan tidak melakukan transaksi penjualan pihak berelasi. Intensitas penjualan tidak setinggi transaksi terkait dan perusahaan harus membayar biaya penjualan yang lebih tinggi sehingga akan berdampak pada menurunnya keuntungan perusahaan dan tentunya mempengaruhi nilai perusahaan yang lebih rendah. Pernyataan ini didukung oleh temuan penelitian dari Lin et al. (2010), yang menjelaskan bahwa transaksi penjualan pihak berelasi berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pelaksanaan transaksi pembelian pihak berelasi dalam kegiatan usaha perusahaan diyakini sangat efisien. Pasalnya, perusahaan dapat membeli di bawah harga pasar dan perusahaan dapat menghemat biaya transaksi. Dengan demikian, peluang untuk memperoleh keuntungan akan semakin besar dan akan berdampak pada nilai perusahaan yang lebih tinggi. Hal ini didukung pada temuan riset yang dilakukan oleh Prasetyorini (2013), yaitu transaksi pembelian pihak berelasi berdampak positif terhadap kinerja keuangan.

Selain *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan transaksi pihak berelasi, ukuran perusahaan juga dapat menjadi salah satu dari indikator penting

yang bisa memiliki pengaruh atas bermacam aspek dari kinerja dan strategi perusahaan. Perusahaan besar mengkonsumsi lebih banyak sumber daya daripada perusahaan kecil, yang secara signifikan mempengaruhi kinerja sosial mereka. Perusahaan besar mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak. Ukuran perusahaan menunjukkan perkembangan dan daya saing perusahaan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Besar kecilnya ukuran perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai total aset menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sakiyah et al., 2020). Namun, perusahaan besar juga menghadapi tantangan kompleksitas operasional, risiko konflik kepentingan, dan pengawasan regulasi yang lebih ketat. Dari perspektif akuntansi dan keuangan, dari segi perspektif pemangku kepentingan menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan regulator.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi adanya kesenjangan pengetahuan dalam literatur akibat temuan yang belum konsisten dengan studi sebelumnya terkait pengaruh kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap nilai perusahaan yang telah dijelaskan melalui review penelitian terdahulu pada Bab 2. Selain itu, peneliti juga merespons saran atas riset dari beberapa penelitian terdahulu dan peneliti menambahkan variabel independen lain seperti transaksi pihak berelasi dan ukuran perusahaan yang digunakan sebagai variabel kontrol untuk keterbaruan dalam penelitian ini. Keterkaitan antar variabel independen dalam penelitian ini yaitu

kinerja ESG dan transaksi pihak berelasi memiliki benang merah yang sama yang dimana keduanya berakar pada kualitas tata kelola perusahaan yang baik. Kinerja ESG mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola risiko dan tanggung jawabnya secara berkelanjutan di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sementara itu, transaksi pihak berelasi sering kali menjadi indikator sejauh mana sebuah perusahaan menerapkan tata kelola yang transparan atau berpotensi menyembunyikan konflik kepentingan. Jadi, meskipun secara teknis keduanya terlihat berbeda, namun secara konseptual keduanya saling berkaitan karena dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap kualitas pengelolaan perusahaan dan pada akhirnya dapat mempengaruhi nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Maka dari itu, peneliti akhirnya melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Nilai Perusahaan”**. Peneliti melihat relevansi kinerja ESG dan transaksi pihak berelasi terhadap nilai perusahaan, studi ini berupaya mengidentifikasi sejauh mana kedua faktor tersebut mempengaruhi persepsi nilai di pasar modal, khususnya di era dengan tuntutan keberlanjutan yang semakin meningkat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan identifikasi masalah penelitian mengenai pengaruh Kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan Transaksi Pihak Berelasi terhadap Nilai Perusahaan. Berikut adalah dua butir bagian rumusan masalah dalam penelitian ini.

- 1) Apakah Kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan?
- 2) Apakah Transaksi Pihak Berelasi memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui pengaruh Kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap Nilai Perusahaan.
- 2) Mengetahui pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Nilai Perusahaan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapula nanti hasil dari penelitian ini harapan peneliti semoga bisa memberikan manfaat yang berfaedah baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Literatur**

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pandangan mengenai pengaruh Kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan Transaksi Pihak Berelasi terhadap Nilai Perusahaan. Melalui penelitian ini pula, peneliti juga ingin mengaplikasikan wawasan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama waktu studi perkuliahan.

- 2) Menambah referensi dari sejumlah temuan penelitian bagi lingkungan akademis yang bisa ditemukan dalam perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, terkait dengan akuntansi keuangan khususnya tentang Kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan Transaksi Pihak Berelasi yang mempengaruhi Nilai Perusahaan.
- 3) Terdapat pembuktian atas *gap* penelitian yang ada dari berbagai penelitian terdahulu mengenai Kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan Transaksi Pihak Berelasi terhadap Nilai Perusahaan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1) Menyediakan informasi dan rekomendasi bagi manajemen perusahaan, regulator, dan investor tentang pentingnya penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), sekaligus menekankan perhatian terhadap Transaksi Pihak Berelasi dalam upaya meningkatkan Nilai Perusahaan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi bagi manajemen perusahaan yang memungkinkan penilaian bisa lebih komprehensif terhadap nilai perusahaan terkait faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta transaksi yang melibatkan pihak-pihak berelasi.
- 3) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan akurat mengenai nilai perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat memperbarui atau mengembangkan peraturan yang dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan.